

PENYEDIAAN DAN INTEGRASI DATA LINTAS SEKTOR TERKAIT KELUARGA BERISIKO STUNTING

DIREKTUR PELAPORAN DAN STATISTIK
BKKBN

Jakarta, 15 Desember 2021

01

Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pasal 49

- (1) **Pemerintah dan pemerintah daerah wajib** mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan **pendataan keluarga**.
- (3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga **wajib** digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai **dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan**

UU No. 52 tahun 2009

PP No. 87 tahun 2014

UU No. 16 tahun 1997

UU No 23 tahun 2014

02

Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga

Pasal 52

Pengumpulan data dan informasi keluarga dilaksanakan melalui **Pendataan Keluarga**

Pasal 53

- (1) Pendataan keluarga **wajib** dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara serentak **setiap 5 (lima) tahun** untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.
- (2) Pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilakukan oleh Kader setempat di bawah pembinaan penyuluh Keluarga Berencana** dan/atau petugas lapangan Keluarga Berencana.

03

Tentang statistik

Pasal 12

- (1) **Statistik Sektoral** diselenggarakan oleh **instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya**, secara mandiri atau bersama-sama dengan Badan

04

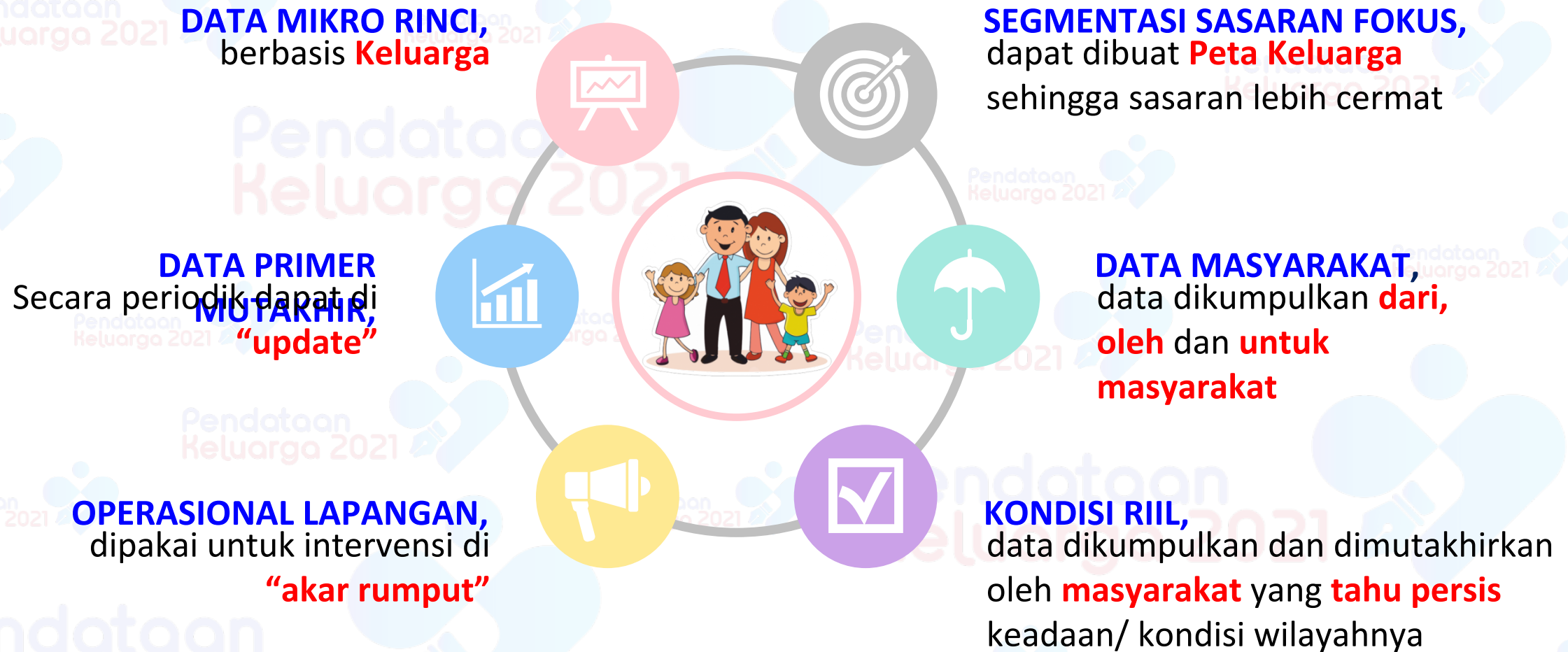
Tentang Pemerintahan Daerah

Lampiran : **N. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,**

Sub Urusan 2. Keluarga Berencana,

poin d: **Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga**

Karakteristik Data Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21)



Indikator Data Hasil Pendataan Keluarga 2021



Pengukuran
Indikator Kinerja Utama
(IKU)



- TFR
- CPR
- *Unmet need (proxy)*
- ASFR
- Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)
- Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)
- **Pemetaan Keluarga berpotensi risiko Stunting**



INDIKATOR
KEPENDUDUKAN



INDIKATOR
KELUARGA BERENCANA



INDIKATOR
PEMBANGUNAN KELUARGA

60 Tabel indikator * DISAJIKAN DALAM WEB PORTAL PK21
<https://portalpk21.bkkbn.go.id/laporan/tabulasi>



HASIL PENDATAAN KELUARGA 2021

JUMLAH & PERSENTASE KK TERDATA NASIONAL

68.478.139

KK

102%

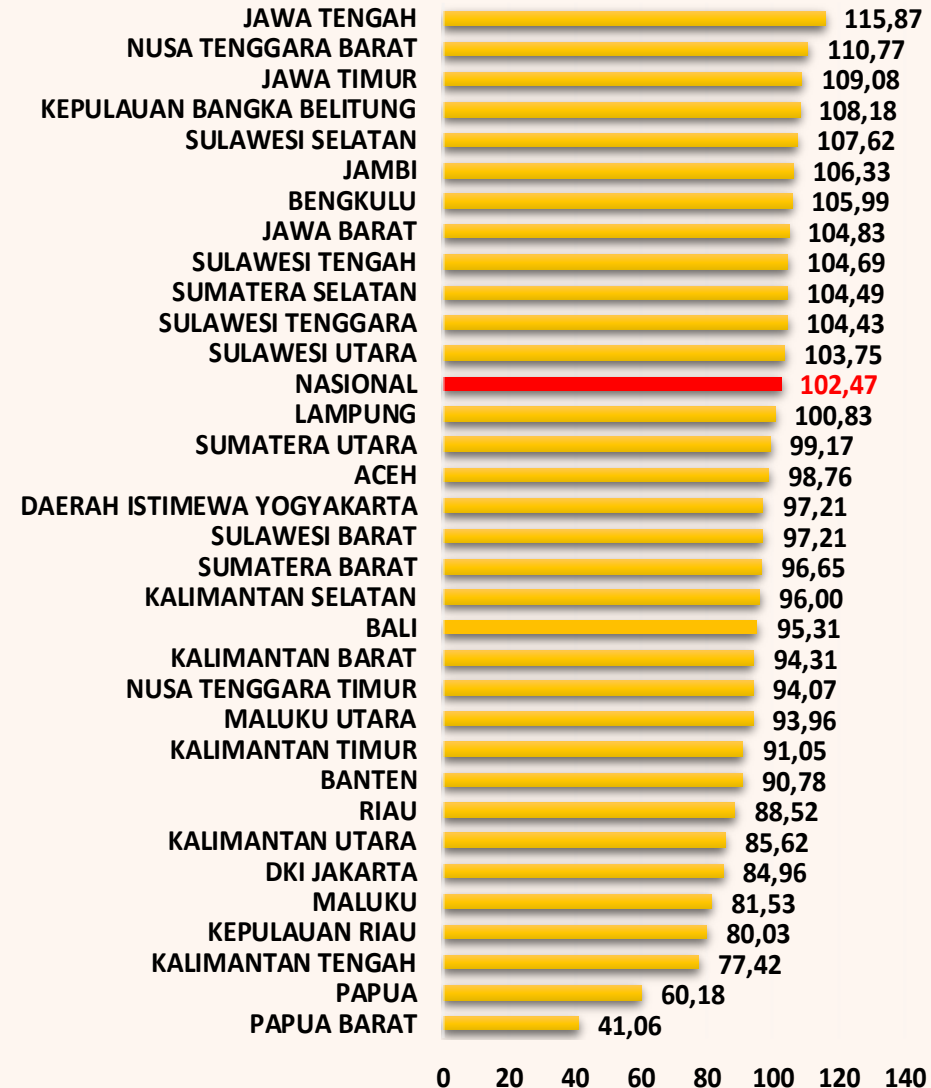
dari Target APBN 66.828.571 keluarga

JUMLAH & PERSENTASE KK TERDATA

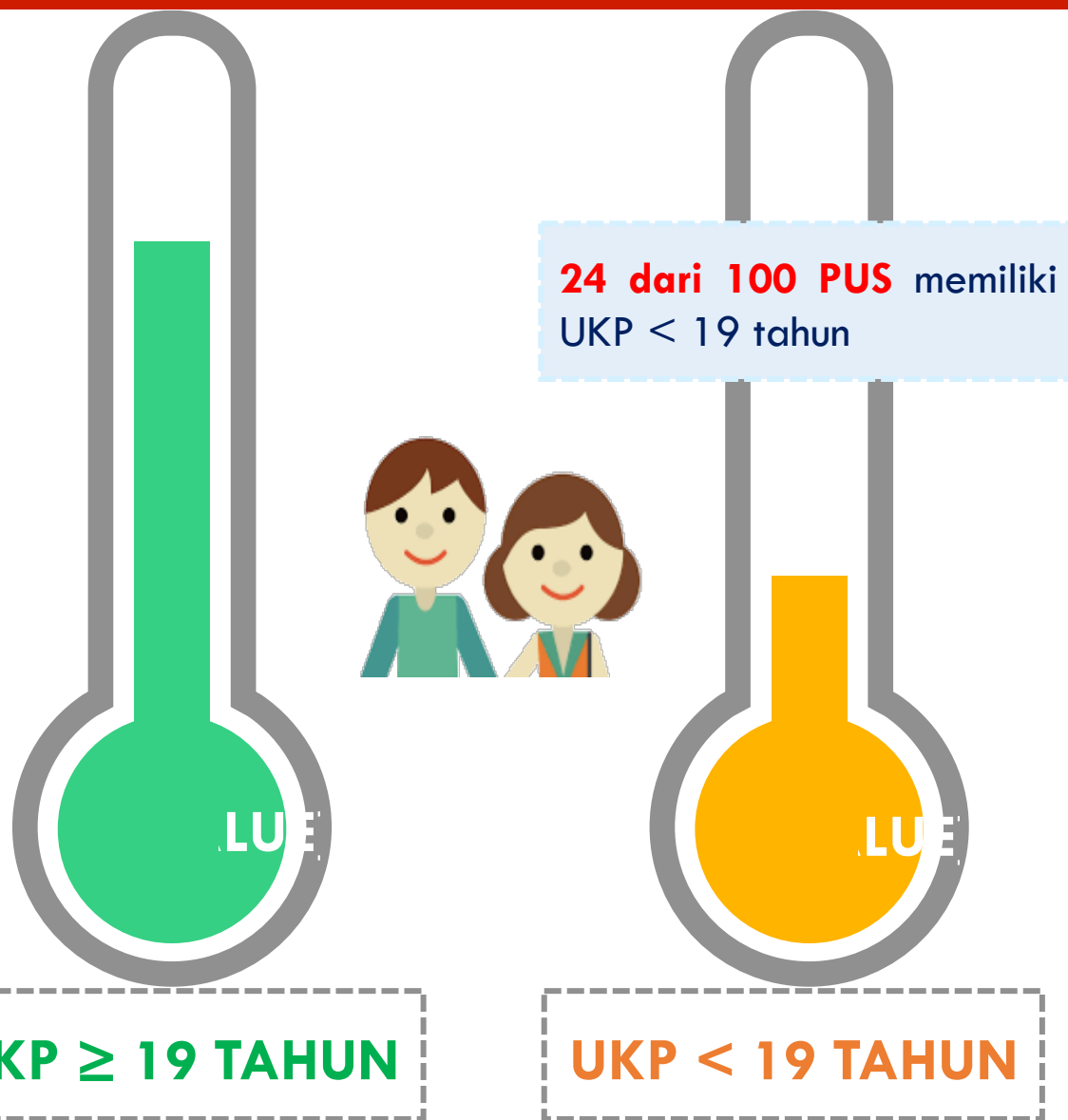


TOP 5 PROVINSI KK TERBANYAK

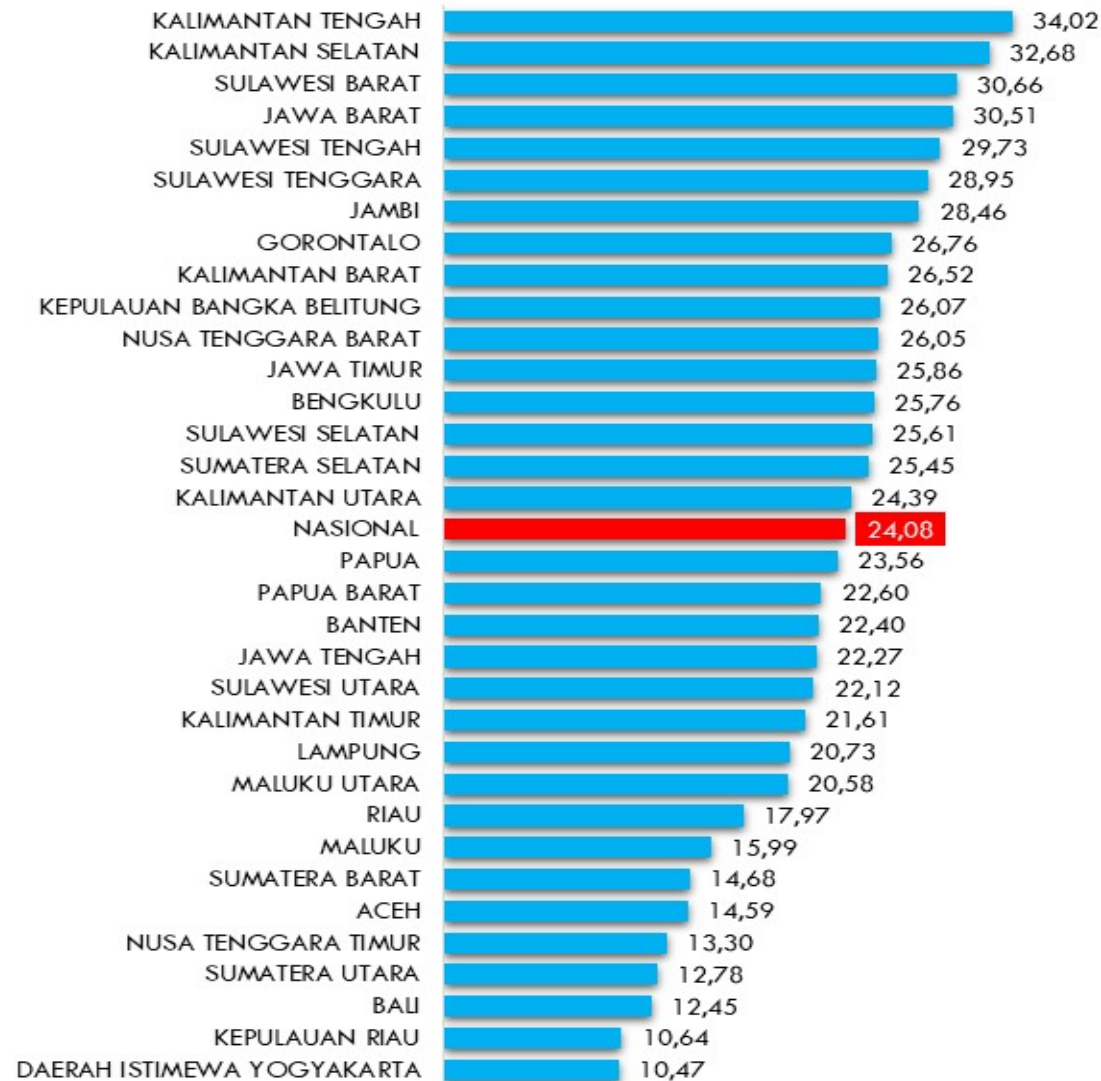
JAWA BARAT	13.283.382
JAWA TIMUR	11.848.066
JAWA TENGAH	10.679.773
SUMATERA UTARA	3.337.404
BANTEN	2.658.505



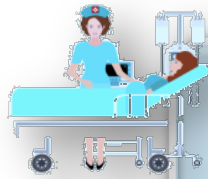
PUS MENURUT UMUR KAWIN PERTAMA (UKP)



PUS dengan UKP < 19 Tahun menurut Provinsi



PUS DENGAN STATUS HAMIL PADA SAAT PERIODE PENDATAAN KELUARGA



1.418.795

PUS HAMIL



3,69 %

atau **4 dari 100 PUS** sedang mengalami kehamilan

PUS Hamil menurut Keinginan Kehamilan



89.33

Ingin Hamil Saat Itu

10,67 %

kehamilan tidak diinginkan



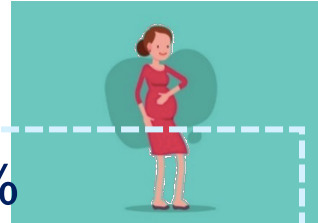
8.11

Ingin Hamil Nanti



2.55

Tidak Ingin Anak Lagi



3,45 %

Terlalu Muda

16,89 %

Terlalu Tua

PUS HAMIL MENURUT 4T

* % terhadap PUS hamil pada saat periode Pendataan Keluarga

9,58 %

Terlalu Banyak

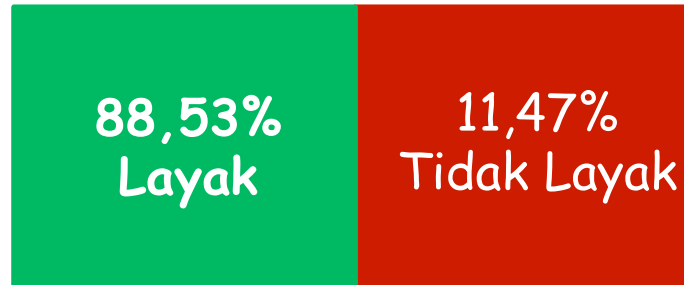
9,27 %

Terlalu Dekat

Rumah Layak Huni



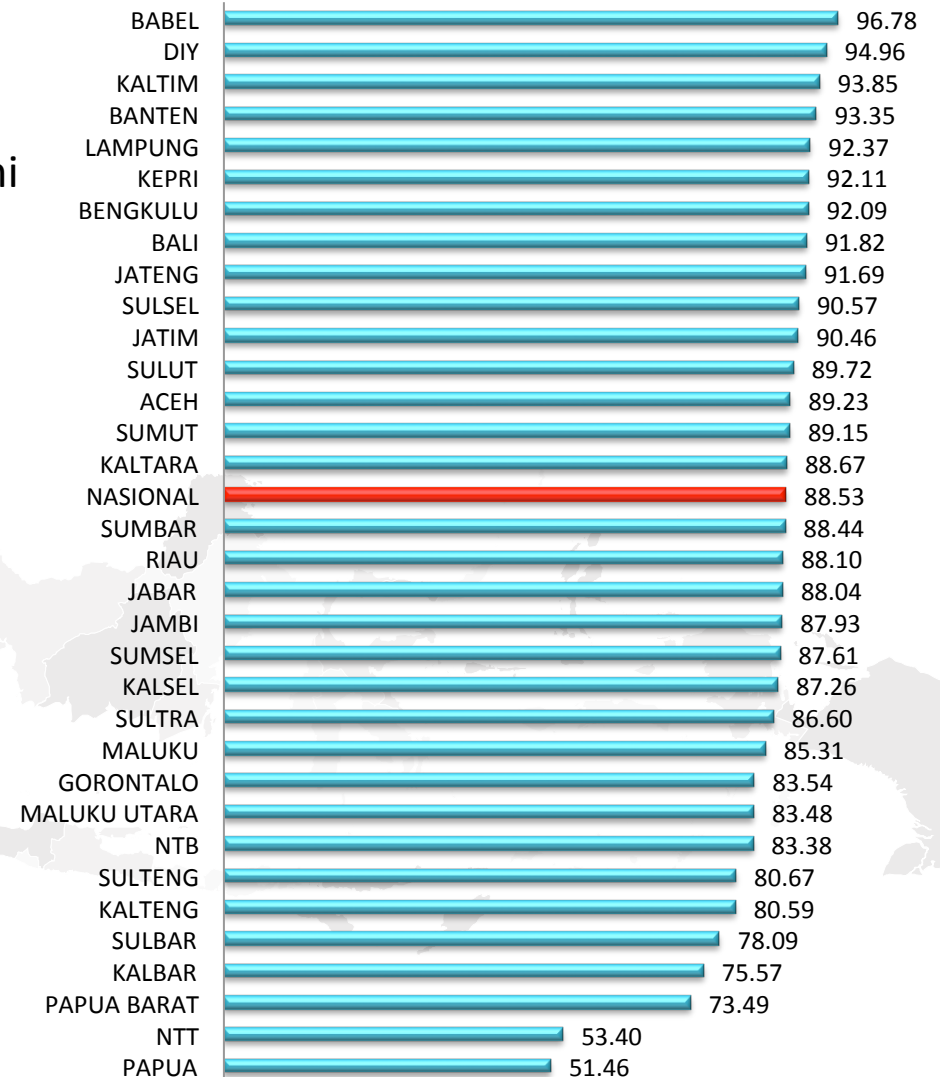
58.615.644 dari 66.207.139
keluarga di Indonesia tinggal di rumah layak huni



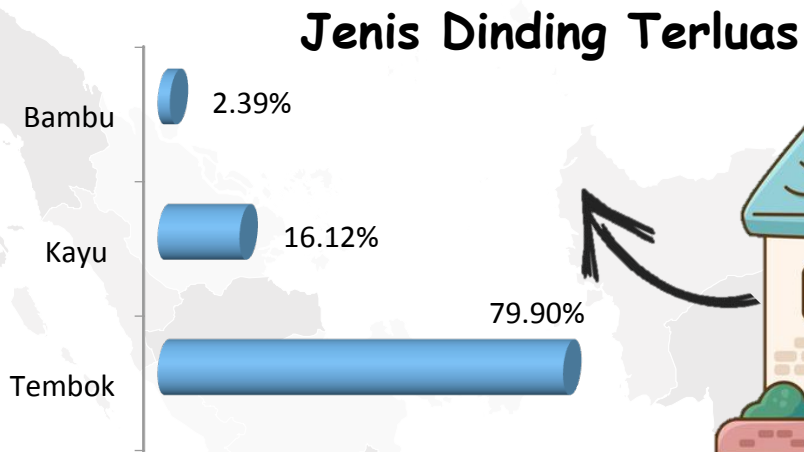
Rumah layak huni memenuhi **6** dari **7** kriteria berikut :

- ✓ Persyaratan Keselamatan bangunan :
Atap, lantai, dan dinding yang layak
- ✓ Kecukupan minimum luas bangunan :
minimal 7,2 m^2 per orang
- ✓ Kesehatan Lingkungan Rumah :
Ketersediaan listrik, jamban, dan air minum

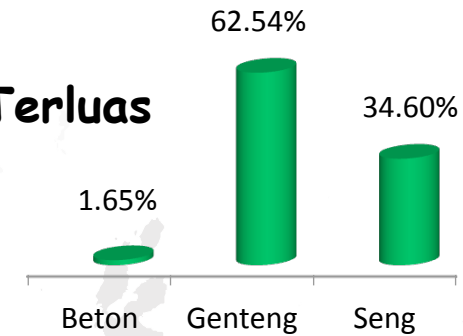
Persentase Kepemilikan Rumah Layak Huni per Provinsi



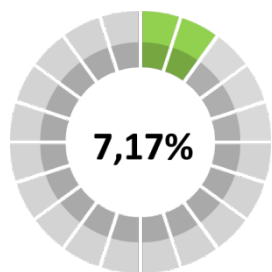
Rumah Layak Huni



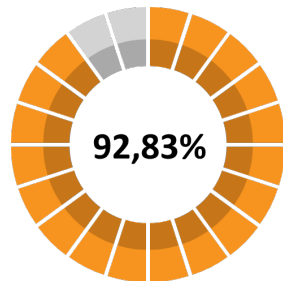
Jenis Atap Terluas



Luas Rumah/Bangunan

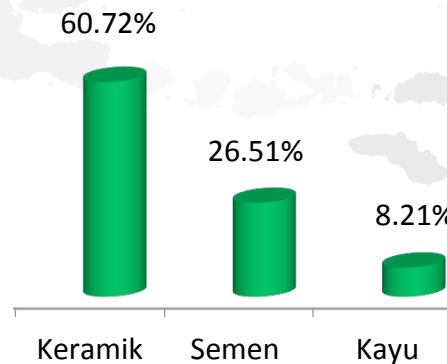


<72 m²

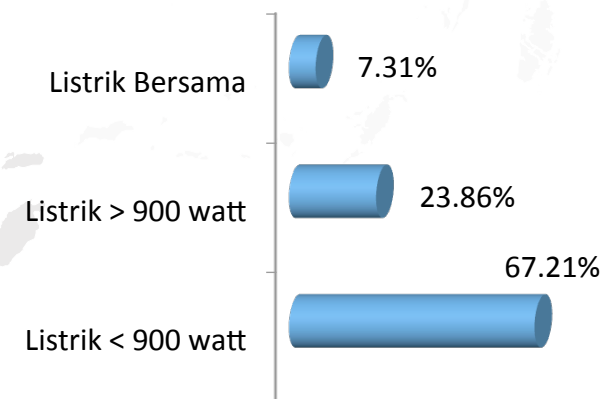


≥72 m²

Jenis Lantai Terluas



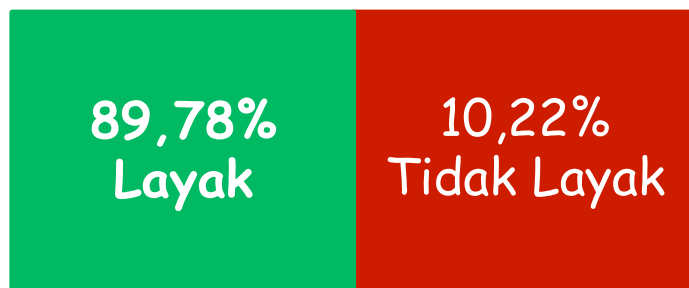
Sumber Penerangan Utama



Sumber Air Minum Utama Layak



59.447.727 dari **66.207.139** keluarga di Indonesia memiliki sumber air minum utama layak



Sumber air minum layak memenuhi salah satu kriteria berikut :

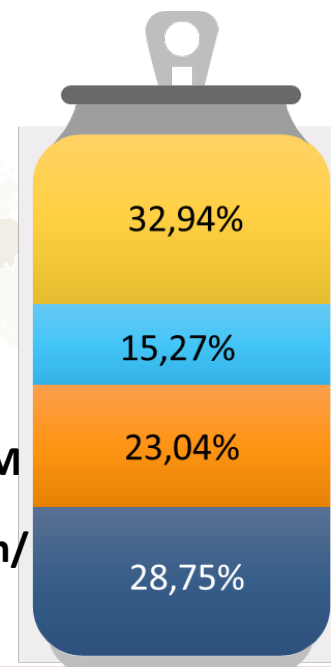
- ✓ Air Kemasan/ Isi Ulang
- ✓ Ledeng/PAM
- ✓ Sumur BOR
- ✓ Sumur Terlindungi

Sumur Terlindungi

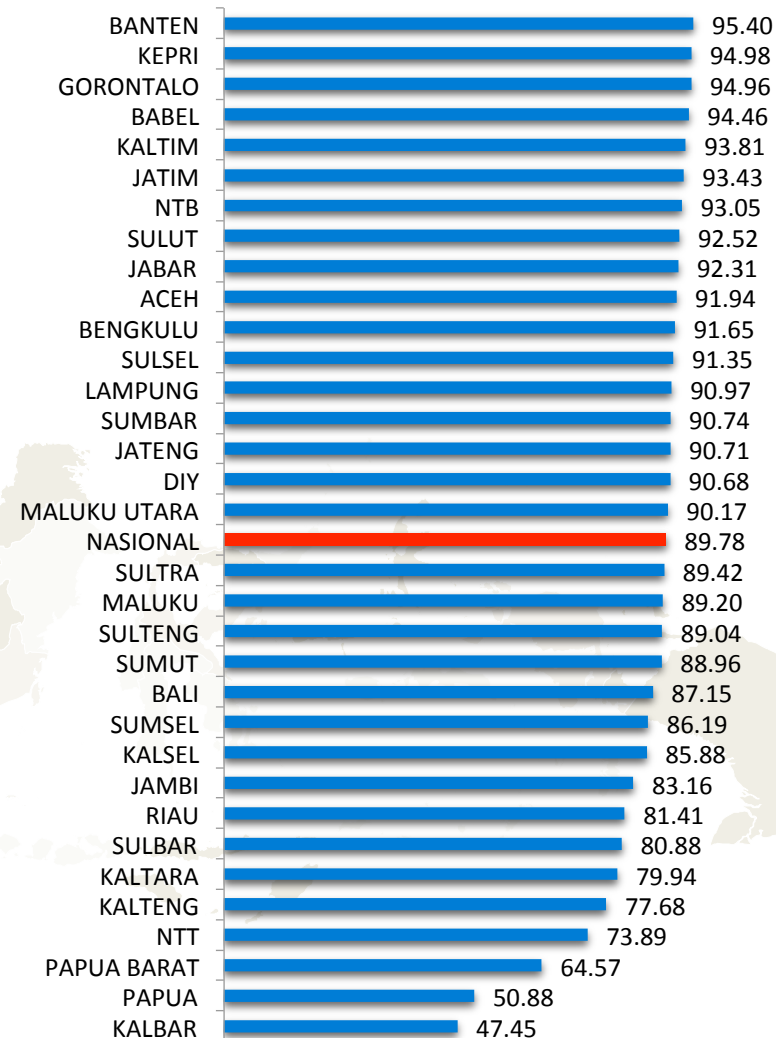
Sumur Bor

Ledeng/PAM

Air Kemasan/ Isi Ulang



Persentase Sumber Air Minum Utama per Provinsi



Sanitasi Layak



55.696.345 dari 66.207.139.
keluarga di Indonesia telah memiliki jamban
dengan septic tank



84.12



8.18



5.57



2.13

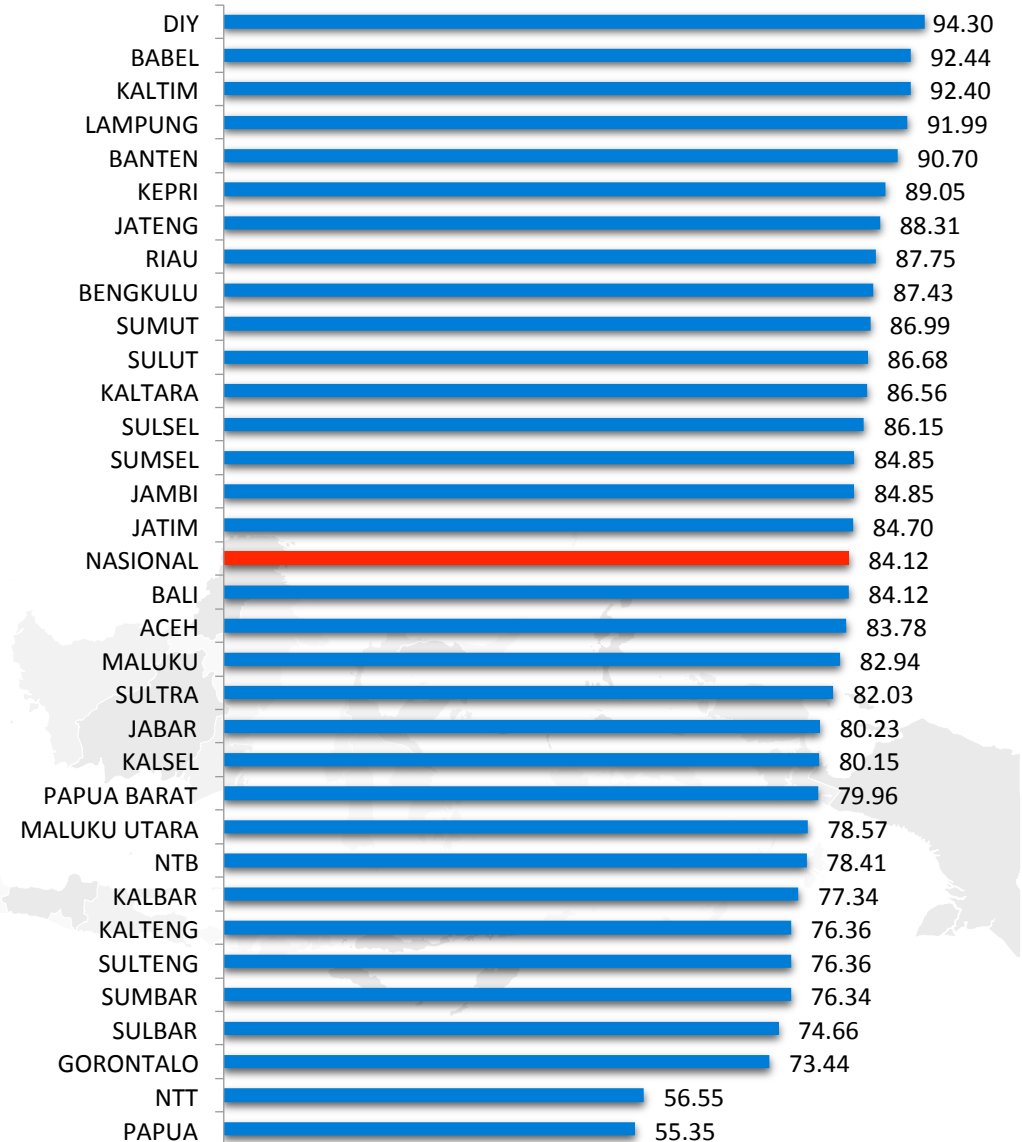


84,12%
Layak

15,88%
Tidak Layak

■ DENGAN SEPTIC TANK
■ TANPA SEPTIC TANK
■ JAMBA UMUM/ BERSAMA
■ LAINNYA

Persentase Kepemilikan Jamban per Provinsi





STRATEGI PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI)

Penajaman intervensi 'hulu' dengan prioritas mencegah lahirnya anak stunting.



Finalisasi

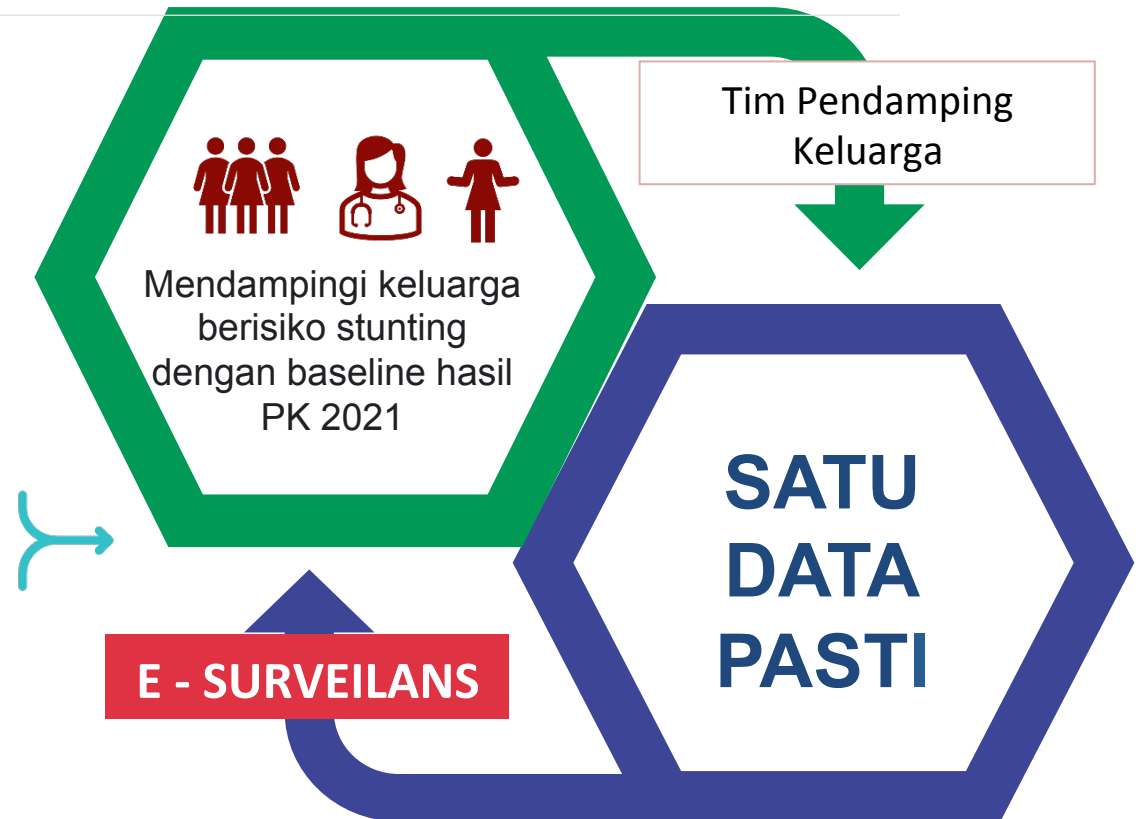
(penyediaan data, pendampingan dan surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting)

PROGRAM INKUBASI

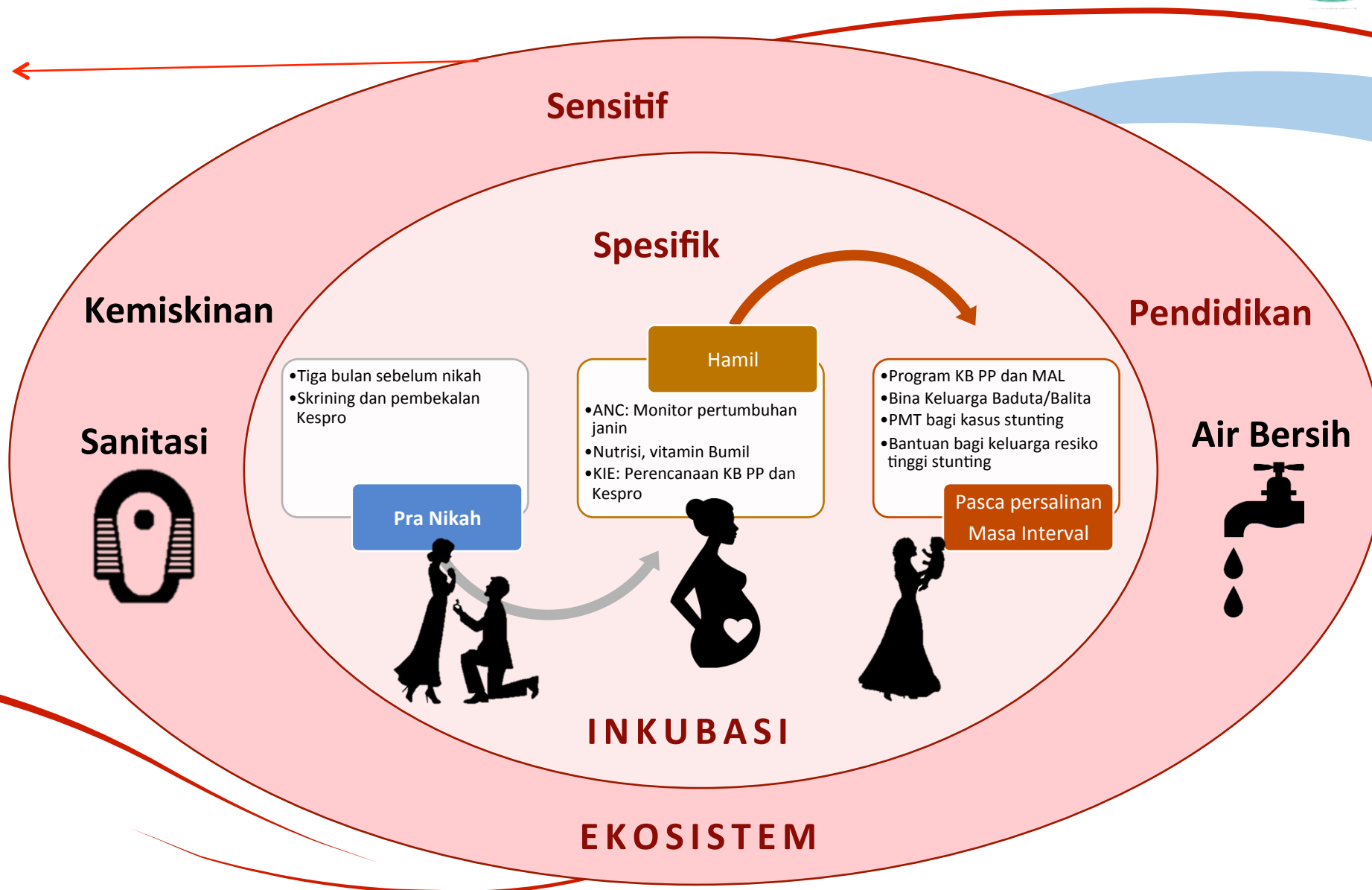
Critical success factor
memastikan keluarga mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga.



- Mempersiapkan kesehatan calon pengantin/calon ibu
- Memastikan asuhan ibu hamil dan ibu pasca melahirkan dilakukan sesuai standar
- Mendampingi ibu menyusui dan pengasuhan 1000 HPK



Data **Pendataan Keluarga 2021** memetakan **Keluarga Sasaran Berpotensi Risiko Stunting** yaitu : Keluarga Sasaran dengan penapisan keluarga pra sejahtera, sanitasi, akses air bersih, rumah tidak layak huni dan pendidikan ibu rendah





PEMETAAN KELUARGA SASARAN BERPOTENSI RISIKO STUNTING **BY NAME BY ADDRESS**

HASIL PENDATAAN KELUARGA 2021

REKAPITULASI KELUARGA SASARAN BERPOTENSI RISIKO STUNTING

DATA RAHASIA

Provinsi : Maluku
Kabupaten : Buru
Kecamatan : Air Buaya
Kelurahan : Air Buaya

RW	RT	NIK	Nama KK	SASARAN				PENAPISAN								BERESIKO /TIDAK	
				Baduta	Balita	PUS	PUS hamil	Keluarga Pra sejahtera	Sumber Air minum Tidak layak	Jamban Tidak layak	RTLH	Pendidikan istri/ibu rendah	Terlalu Muda	Terlalu Tua	Terlalu Dekat		Terlalu Banyak
RW 001	RT 001	xxxxxxxxx	IKSAN WAMLOLI	X	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RW 001	RT 002	xxxxxxxxx	RUSDI A MULAICIN	X	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
RW 001	RT 002	xxxxxxxxx	RAHMAN PONI	X	X	V	V	X	X	X	X	X	X	X	-	X	V
RW 001	RT 002	xxxxxxxxx	JAHRU KAU	X	X	V	V	X	X	X	V	V	X	X	-	X	V
RW 001	RT 003	xxxxxxxxx	DAUD MULAICIN	X	V	V	X	X	X	X	X	X	X	V	X	X	V
RW 001	RT 003	xxxxxxxxx	ABDUL M GAILEA	X	X	V	X	X	X	X	X	X	X	V	X	V	V
RW 001	RT 003	xxxxxxxxx	ISMAIL LATUCONSIN	X	X	V	V	X	X	X	X	X	X	V	-	X	V
RW 002	RT 001	xxxxxxxxx	FAIZAL BIDAULAH	X	V	V	X	X	X	X	X	X	X	V	X	V	V
RW 002	RT 002	xxxxxxxxx	ALFARID GAILEA	X	V	V	X	X	X	V	V	X	X	X	-	X	V
RW 002	RT 002	xxxxxxxxx	JULKARNAIN WARN	X	V	V	X	X	X	X	V	X	X	X	-	X	V
RW 002	RT 002	xxxxxxxxx	SALEM MULAICIN	X	X	V	X	X	X	X	V	X	X	V	X	X	V
RW 002	RT 002	xxxxxxxxx	YASER MULAICIN	X	V	V	X	X	X	X	V	X	X	X	X	X	V

Note:

- V : menunjukkan memenuhi kriteria sasaran/penapisan/risiko
- X : tidak memenuhi kriteria sasaran/penapisan/risiko
- : Tidak berlaku

KATEGORI:

- BERESIKO jika memenuhi salah satu faktor resiko pada Penapisan
- Ibu hamil --- memnuhi/tdk memenuhi faktor resiko dikategorikan beresiko (sasaran pendampingan)



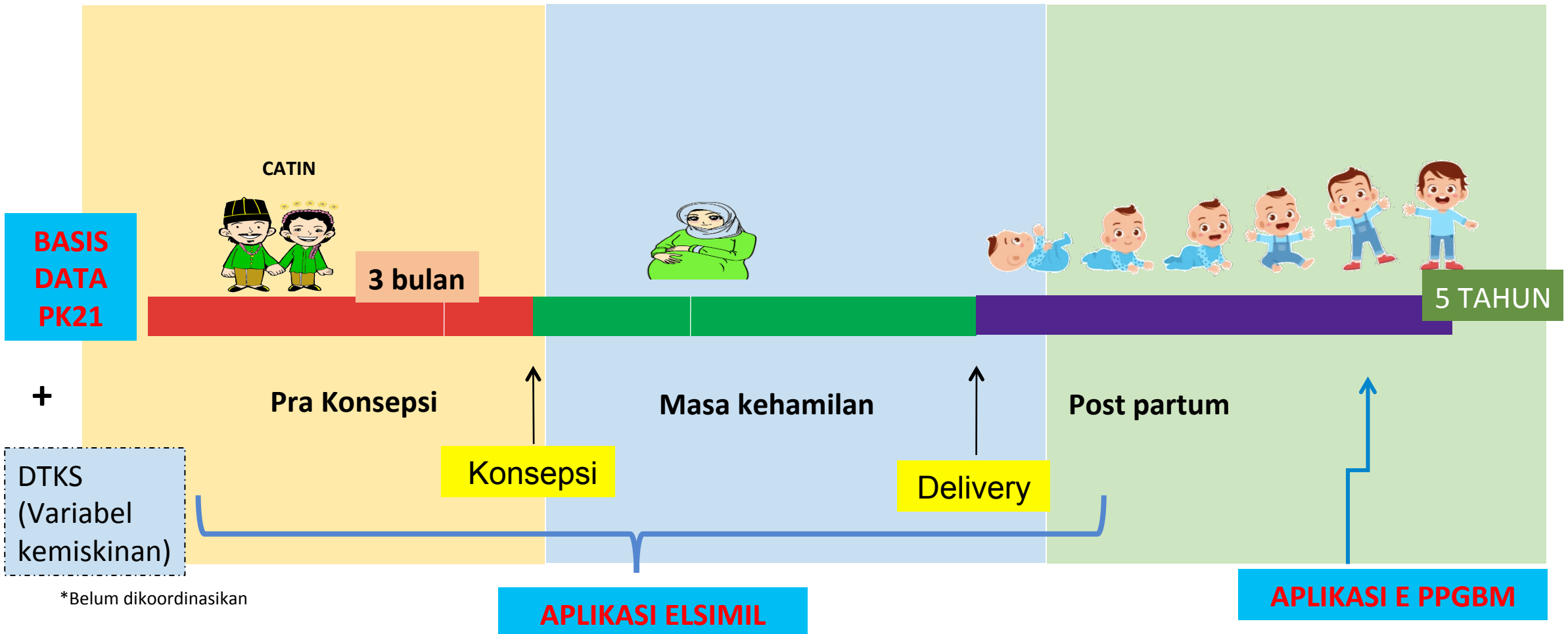
PEMETAAN KELUARGA SASARAN BERPOTENSI RISIKO STUNTING HASIL PENDATAAN KELUARGA 2021: CONTOH DI PROVINSI MALUKU

Kab/Kota	Jumlah Keluarga	SASARAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING				PENAPISAN									JUMLAH KELUARGA SASARAN BERPOTENSI RISIKO STUNTING
		Jumlah Keluarga Memiliki Baduta	Jumlah Keluarga Memiliki Balita	Jumlah PUS	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	FASILITAS LINGKUNGAN RUMAH			Jumlah Keluarga dengan Pendidikan istri rendah (< SLPTP)	PUS DENGAN RISIKO 4 T				
							Jumlah Keluarga dengan Akses Sumber Air Minum Tidak layak	Jumlah Keluarga dengan Sanitasi Tidak layak	Jumlah Keluarga dengan Rumah Tidak Layak Huni		TERLALU MUDA	TERLALU TUA	TERLALU DEKAT	TERLALU BANYAK	
BURU	27659	1516	4312	18484	695	2416	854	3983	6428	6740	135	9640	917	7064	15464
BURU SELATAN	2942	320	781	2037	98	615	206	779	1049	799	14	1018	157	1155	1865
KEPULAUAN ARU	8725	914	1831	5559	201	1103	1232	2705	4017	2149	59	3081	387	2720	5376
KEPULAUAN TANIMBAR	18465	1416	3058	11076	318	2271	692	1477	5480	2489	173	6198	720	5357	10175
KOTA AMBON	61796	4256	8325	33148	894	3367	2786	2134	10209	2605	126	20085	2065	12944	27610
KOTA TUAL	10401	713	1661	5545	227	608	597	296	1453	1325	28	3047	442	2694	4729
MALUKU BARAT DAYA	14381	1052	2779	8100	241	2027	1065	2086	5248	2285	53	4507	521	4415	7603
MALUKU TENGAH	76584	6508	12281	42228	1665	6839	5268	7964	17424	9096	405	24007	2360	18902	37021
MALUKU TENGGARA	20177	1761	3638	10094	445	2347	1736	1970	5539	2827	107	5463	763	5246	9264
SERAM BAGIAN BARAT	27988	2732	5666	18699	870	3841	1654	4776	7994	5669	166	10224	1231	9052	16705
SERAM BAGIAN TIMUR	19713	1949	4031	12872	695	2747	2827	3796	8265	4580	90	6646	931	5890	11936
Total	288831	23137	48363	167842	6349	28181	18917	31966	73106	40564	1356	93916	10494	75439	147748

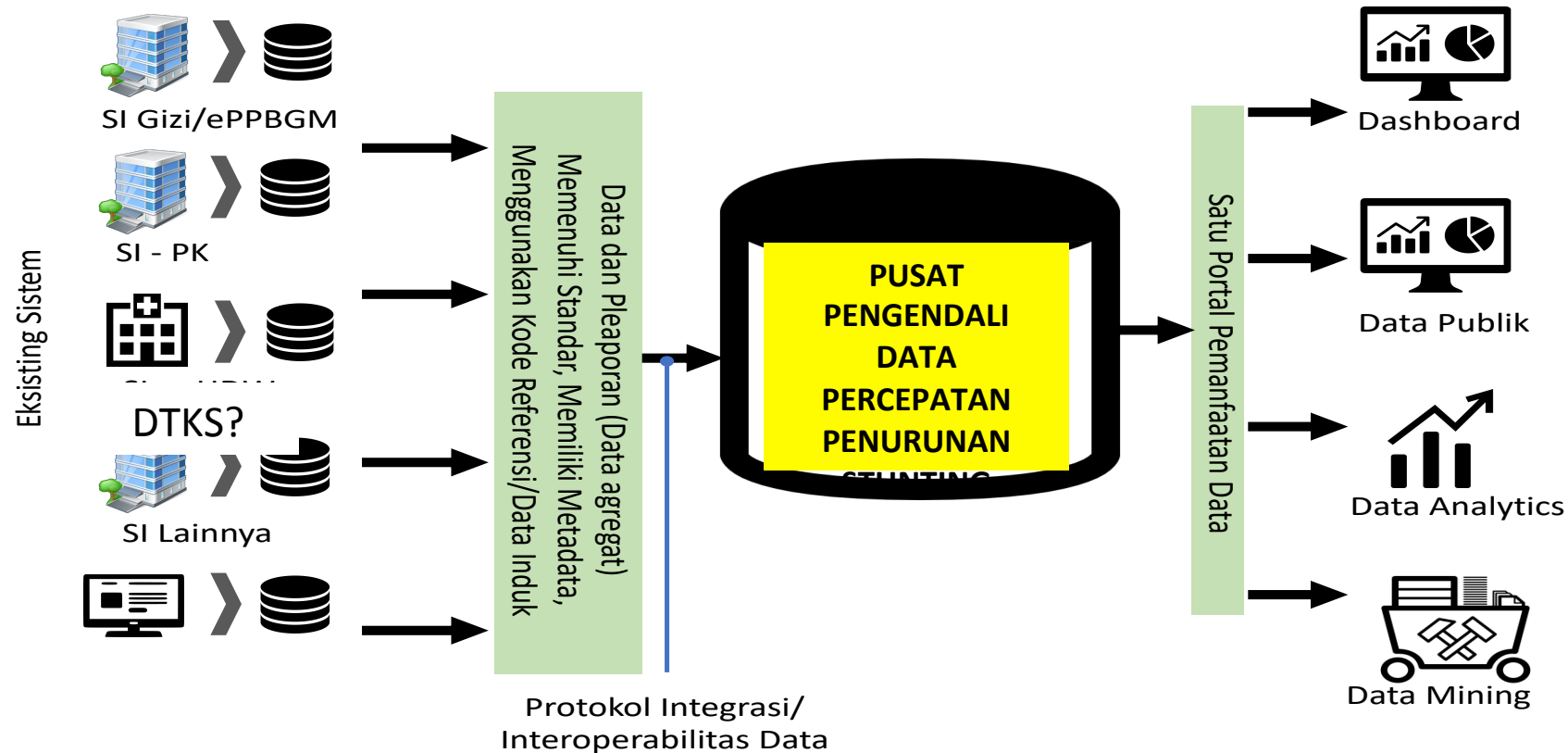


- Kab/kota di Provinsi Maluku yang termasuk kemiskinan ektrim 9 kab/kota dari 11 kab/kota (seluruh kab/kota kecuali Buru Selatan dan Kota Ambon)
- Pemetaan dapat dilakukan untuk seluruh provinsi**
- Pemetaan dapat dilihat menurut provinsi – kab/kota – kecamatan – desa/kelurahan – RW/RT bahkan sampai **keluarga *by name by address***. Artinya, dapat diketahui keluarga mana saja yang tidak memiliki rumah/akses air minum/sanitasi tidak layak

KONSEP INTEGRASI DATA : DATA SET Pra Nikah, hamil, masa interval, **BALITA**



SISTEM MANAJEMEN DATA **MIKRO** TERPADU: Dikelola oleh Pusat Pengendali Data Nasional



PRINSIP DASAR sesuai Perpres SATU DATA:

1. Standar data
2. Meta data
3. Interoperabilitas data
4. Penggunaan kode referensi dan/atau data induk

Sistem manajemen data mikro terpadu merupakan sebuah sistem data yang dibangun untuk menghimpun/mengintegrasikan **DATA MIKRO** percepatan penurunan stunting yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta **mudah diakses dan dibagikan** antar Kementerian/Lembaga pelaksana sesuai dengan kewenangannya sehingga terwujud **SATU DATA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING** dengan memanfaatkan sistem informasi yang telah ada



<https://portalpk21.bkkbn.go.id/laporan/tabulasi>

“TERIMA KASIH”